Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Volume 6, Nomor 1, April 2026
E-ISSN: 2827-8666; P-ISSN: 2827-8682, Hal. 171-191
DOI: https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6888
Tersedia: https://journalshub.org/index.php/JUMBIKU

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Bupati Batu Bara

Riris Wati Sidabalok[1*], Rimbun C.D Sidabutar [2], Bonifasius H. Tambunan [3]
[1,2,3] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: riris.sidabalok@student.uhn.ac.id [1], rimbun.sidabutar@uhn.ac.id [2], bonifasius.tambunan@uhn.ac.id [3]

**Penulis Korespondensi: riris.sidabalok@student.uhn.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Government Accounting Standards (SAP) Implementation and the Quality of Local Government Apparatus on the Quality of Financial Reports at the Batu Bara Regent's Office. The study used a quantitative approach with a survey method and distributed questionnaires to 52 local government apparatus respondents. Data analysis was performed using multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2).The results show that SAP Implementation has a positive and significant effect on the quality of financial reports, as does the Quality of Local Government Apparatus. Simultaneously, these two independent variables significantly influence the quality of financial reports, contributing 46.8% (R^2 = 0.468), while the remaining 53.2% is influenced by factors outside this study. The lowest indicator of the quality of the apparatus is the ability to use the regional financial information system, which requires special attention through training, workshops, mentoring, and e-learning modules.*

Keywords: *Apparatus Quality; Government Accounting Standards; Multiple Linear Regression; Regional Government; Report Quality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Bupati Batu Bara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan menyebarkan kuesioner kepada 52 responden aparatur pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, begitu pula Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah yang juga berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 46,8% (R^2 = 0,468), sedangkan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Indikator yang paling rendah pada kualitas aparatur adalah kemampuan menggunakan sistem informasi keuangan daerah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pelatihan, *workshop*, pendampingan, dan modul *e-learning*.

Kata Kunci: Kualitas Aparatur; Kualitas Laporan; Pemerintah Daerah; Regresi Linear Berganda; Standar Akuntansi Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. LKPD ini Merupakan indikator penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar yang diharapkan, seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Namun, dalam praktiknya,

Naskah Masuk: 18 Desember 2025; Revisi: 21 Januari 2026; Diterima: 14 Februari 2026; Tersedia: 16 Februari 2026

banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Afiah, 2020).

Kualitas laporan keuangan mencerminkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan (setyaningrum *et al*. 2020). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya diartikan sebagai tersusunnya laporan secara tepat waktu, tetapi juga mencerminkan sejauh mana informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna seperti DPRD, masyarakat, dan lembaga pengawas. Laporan yang berkualitas harus mampu memberikan gambaran yang jujur mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta arus kas pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan. Apabila kualitas laporan keuangan rendah, misalnya karena adanya salah saji, pengungkapan yang tidak memadai, atau ketidaksesuaian dengan SAP, maka akuntabilitas pemerintah daerah akan dipertanyakan dan potensi terjadinya penyimpangan anggaran menjadi lebih besar.

Namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi tersebut masih menghadapi hambatan serius. Salah satu fenomena empiris yang memicu penelitian adalah maraknya kasus-kasus negatif seperti korupsi, praktik suap menyuap, integritas yang rendah, dan berbagai bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengendalian internal yang perlu diatasi melalui penelitian.

Salah satu reformasi kebijakan terbesar untuk mengatasi permasalahan ini adalah transisi dari akuntansi berbasis kas ke Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Secara konsisten, peneliti menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, menegaskan bahwa kepatuhan pada standar merupakan fondasi awal peningkatan laporan keuangan Zahroh, Kusuma & Melani (2024), Suliswati & Tandean (2014) mulai diterapkan pada tahun 2015, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Nugraheni & M. Budiantara (2015) menunjukkan bahwa penerapa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi yang baik dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kualitas aparatur pemerintah daerah juga memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan. Peneliti oleh Trisnawati & Wiratmaja (2018) Menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Aritonang (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hubungan antara kualitas aparatur dan kualitas laporan keuangan terlihat dalam bagaimana aparatur yang terampil dapat meminimalkan resiko kesalahan dan meningkatkan relevansi informasi yang disajikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur dengan pendidikan tinggi dan pelatihan berkala cenderung menghasilkan laporan yang lebih akurat. Faktor ini menjadi lebih penting dalam penerapan SAP di tingkat daerah. peneliti oleh (Sari & Wahyuni, 2018).

Di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang berkembang, pengelolaan keuangan daerah sering kali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kantor Bupati Batu Bara sebagai entitas utama penyusunan laporan keuangan perlu memastikan SAP diterapkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, data awal menunjukkan adanya masalah dalam konsistensi laporan keuangan (Lubis *et al*, 2019)

Masalah spesifik di Kabupaten Batu Bara meliputi keterlambatan penyampaian laporan dan ketidaksesuaian dengan standar SAP, yang mungkin disebabkan oleh aparatur yang belum sepenuhnya kompeten. Hal ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan investasi dan alokasi anggaran yang kurang optimal. Oleh karena itu perlunya peningkatan kapasitas aparatur untuk mengatasi masalah ini. (putra & Suryani, 2020)

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik yang efektif. Di Indonesia, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan oleh kementrian keuangan, guna memastikan informasi keuangan yang akurat, laporan keuangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, termasuk penerapan SAP daerah yang bertugas dalam penyusunan dan pengelolaan laporan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kantor Bupati Batu Bara Utara.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dirancang untuk menyediakan kerangka kerja yang seragam dalam pelaporan keuangan sektor publik, mencakup aspek seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Penerapan SAP yang baik dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, mengurangi resiko kesalahan, dan memfasilitaskan pengambilan keputusan oleh stakeholder seperti masyarakat, investor, dan pemerintah pusat. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap SAP sering menyebabkan laporan

keuangan yang tidak sesuai terhadap standar, seperti adanya kesalahan dalam klasifikasi aset atau pengakuan pendapatan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas laporan. Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan SAP menjadi tantangan karena kompleksitas operasional dan variasi kapasitas sumber daya manusia.

Kualitas aparatur pemerintah daerah, yang meliputi kompetensi, pengalaman, dan integritas pegawai yang terlibat dalam proses akuntansi juga berperan krusial. Aparatur yang berkualitas tinggi mampu menerapkan SAP dengan efektif, melakukan audit internal yang ketat, dan merespon perubahan regulasi dengan cepat. Namun, jika aparatur kurang terampil atau tidak mendapat pelatihan memadai, hal ini dapat berujung pada laporan keuangan yang tidak akurat, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi atau keterlambatan penyusunan laporan. Faktor ini sering kali terkait dengan tingkat pendidikan, motivasi, dan sistem pengembangan karir dilingkungan pemerintah daerah.

Fakta lapangan di Kantor Bupati Batu Bara mengungkapkan beberapa fenomena yang mendukung perlunya penelitian ini. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk periode Tahun 2020 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Meskipun demikian,opini WTP ini tidak langsung menghilangkan masalah kualitas laporan, karena BPK secara konsisten menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap SAP, seperti kesalahan dalam pengakuan aset dan kewajiban. Hal ini menunjukkan adanya celah antara Standar Akuntansi yang ketat dan Kualitas implementasi teknis, yang sering kali bersumber dari kapabilitas SDM pelaksana. Selain itu, survei internal terhadap aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa sekitar 40% pegawai dibidang keuangan memiliki tingkat kompetensi yang belum optimal dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terutama dalam penerapan SAP, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengalaman. Fenomena ini terlihat dalam laporan tahunan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dimana terjadi peningkatan volume transaksi keuangan sebesar 15% pertahun, yang mana kualitas laporannya masih rentan terhadap kesalahan manusia dan interpretasi standar yang tidak tepat.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh teori Agency (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) memerlukan mekanisme pengendalian seperti SAP untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teori Sumber Daya Manusia *(Human Resource Theory),* oleh (Becker, 1964) juga relevan, karena menekankan bahwa kualitas aparatur sebagai sumber daya manusia yang kompeten berperan dalam efektivitas

implementasi standar akuntansi. Penelitian terdahulu yang mendukung meliputi studi oleh (Sarah dan Wahyuni, 2018) yang menemukan bahwa penerapan SAP secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dengan koefisien determinasi sebesar 0,65. Selain itu, penelitian oleh (Putra & Suryani, 2020) menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berkontribusi 35% terhadap akurasi laporan keuangan, berdasarkan data dari 50 Kabupaten. Penelitian ketiga oleh (Rahayu & Sari, 2021) mengonfitmasi interaksi antara SAP dan kompetensi aparatur, dimana kombinasi keduanya dapat mengurangi kesalahan laporan hingga 20% di daerah-daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Kantor Bupati Batu Bara, yang merupakan daerah dengan potensi ekonomi tinggi dari sektor pertanian dan industri, dengan mengidentifikasi Pengaruh SAP dan kualitas aparatur terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelaporan, mengurangi resiko audit negatif, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya relevan bagi Kabupaten Batu Bara, tetapi juga dapat menjadi referensi untuk daerah lain di Indonesia yang mengadapi tantangan serupa.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Bupati Batu Bara".

2. LANDASAN TEORI DAN PENGERTIAN VARIABE

Landasan Teori

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan, yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1978), menjelaskan hubungan kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang memindahakan pekerjaan kepada pihak lain (agen) untuk melakukan suatu pekerjaan. Penerapan dalam sektor publik dalam konteks pemerintah daearah, masyarakat (publik) dan DPRD berperan sebagai prinsipal, sementara Pemerintah Daerah (eksekutif), khususnya para aparatur yang mengelola keuangan, bertindak sebagai agen (Nugrahani & Wahyundaru, 2022).

Relevansi dengan penelitian Kualitas Laporan Keuangan adalah alat utama bagi agen (Pemerintah Daerah) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada prinsipal. Laporan yang berkualitas dapat mengurangi asimetri informasi dan biaya

keagenan yang timbul dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Penerapan dan Kualitas Aparatur brfungsi sebagai mekanisme kontrol dan tata kelola untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Teori Institusional (Institutional Theory)

Teori institusional berfokus pada bagaimana institusi, seperti aturan, norma, nilai, dan struktur organisasi, mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Teori ini menekankan bahwa organisasi mengadopsi struktur dan praktik yang dilegitimasi secara sosial untuk memastikan kelangsungan hidup dan mendapatkan dukungan (Scott,2014, dalam Basuki & Ridha, 2023).

Relevansi dengan penelitian, Penerapan dapat dilihat sebagai tekanan isomorfisme koersif *(coercive isomorphism),* dimana pemerintah daerah dipaksa oleh regulasi atau perundang-undangan (PP No.71 Tahun 2010 tentang) untuk untuk mengadopsi praktik akuntansi tertentu. Ketaatan terhadap ini menjadi praktik akuntansi tertentu. Ketaatan terhadap ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan legitimasi dan memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Putri & Zarah, 2024). Kualitas Laporan Keuangan yang baik adalah hasil dari kepatuhan terhadap norma dan aturan , yang mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan legitimasi dimata publik dan entitas pengawas.

Pengertian Variabel

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mahmudi (2016) mengatakan SAP berfungsi untuk menjamin keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara andal oleh para pemangku kepentingan. Penerapan SAP menunjukkan sejauh mana entitas pemerintah daerah mematuhi ketentuan dan kebijakan akuntansi pemerintahan dalam proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP

Menurut Mardiasmo (2018), Mahmudi (2016), serta DiMaggio dan Powell (1983), faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah antara lain: (1) Tingkat pemahaman aparatur terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. (2) Komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan SAP. (3) Kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan. (4) Ketersediaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. (5) Tekanan regulasi yang bersifat wajib (isomorfisme koersif)

Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 serta Sari dan Darwanis (2023), indikator penerapan SAP meliputi: (1) Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP. (2) Penerapan basis akrual secara konsisten. (3) Kelengkapan komponen laporan keuangan pemerintah daerah. (4) Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan akuntansi pemerintah. (5) Konsistensi penerapan SAP pada setiap periode pelaporan.

Pengertian Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2)

Kualitas aparatur pemerintah daerah adalah kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional yang ditunjukkan melalui tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, serta penguasaan terhadap regulasi dan prosedur pemerintahan. Becker (1964) dalam teori modal manusia menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kualitas kinerja dan output organisasi. Dalam konteks pemerintahan, aparatur yang berkualitas akan mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2)

Menurut Becker (1964) dan Sedarmayanti (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas aparatur pemerintah daerah adalah: Tingkat pendidikan formal aparatur, Pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan keuangan daerah, Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis keuangan, Motivasi dan etika kerja aparatur, Dukungan organisasi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia.

Indikator Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan Becker (1964) dan Sedarmayanti (2017), indikator kualitas aparatur pemerintah daerah meliputi: Tingkat pendidikan formal yang dimiliki, Lama dan relevansi pengalaman kerja, Keikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan teknis, Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, Kemampuan menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

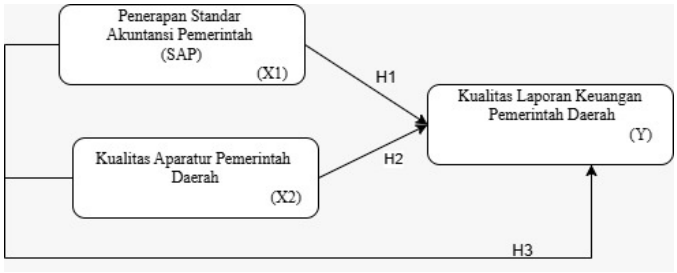
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) dan Mardiasmo (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara konsisten, Kualitas dan kompetensi aparatur penyusun laporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Sistem pengendalian internal pemerintah, Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Mardiasmo (2018), indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi: Relevansi informasi keuangan, Keandalan penyajian laporan keuangan, Dapat dibandingkan antarperiode pelaporan, Dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis.

Sumber: Diolah Peneliti (2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis serta menganalisis hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara numerik. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X_2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Batu Bara, karena instansi ini merupakan pusat pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dengan variabel penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada periode Januari hingga Maret 2026, yang mencakup proses penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis hasil penelitian. Data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya dan dimasukkan ke dalam software analisis seperti SPSS versi 25 untuk pemrosesan lebih lanjut.

Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang terkumpul. Analisis ini mencakup perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap variabel penelitian (X_1, X_2, dan Y). Selain itu, statistik deskriptif juga akan digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan responden pertanyaan kuesioner dalam bsentuk distribusi frekuensi dan persentase.

Hasil dari statistik mengenai kondisi lapangan terkait penerapan SAP, kualitas aparatur, dan kualitas laporan keuangan berdasarkan persepsi para responden. Analisis ini menjadi dasar sebelum melakukan pengujian inferensial yang lebih kompleks.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan Uji Asumsi Klasik untuk memastikan model regresi yang digunakan adalah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian ini mencakup: (1) Uji Normalitas: Menguji apakah data variabel dependen dan independen terdistribusi normal. Uji dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smimov atau metode grafik Normal p-p plot. (2) Uji Autokorelasi (jika data time series, namun untuk data cross-section biasanya diabaikan): Menguji apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t* – 1. (3) uji Multikolinearitas: Menguji apakah ada hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam model regresi. Dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). (4) Uji Heteroskedastisitas: Menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji dapat dilakukan menggunakan uji Glejser atau Scatter Plot. (5) Uji Autokorelasi (jika data time series, namun untuk data cross-section biasanya diabaikan): Menguji apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode *t* – 1.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y, Model regresi yang digunakan adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

1. Koefisien determinasi (R^2), untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Uji t (parsial) dan Uji F (simultan), untuk menguji masing-masing variabel sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) H_1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) H_2: Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) H_3: Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan nilai **p-value** (signifikansi). Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis alternatif (H1, H2, H3) diterima

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi responden laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan di lingkungan Kantor Bupati Batu Bara. Adapun distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	28	53,85
Pere,puan	24	46,15
Jumlah	**52**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 28 orang (53,85%), sedangkan responden perempuan berjumlah 24 orang (46,15%). Komposisi ini menunjukkan bahwa baik aparatur laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang relatif seimbang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Bupati Batu Bara.

Berdasarkan Usia

Pengelompokan usia responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan usia produktif aparatur sipil negara. Distribusi responden berdasarkan usia disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
21-30	8	15,38
31-40	18	34,62
41-50	17	32,69
50>	9	17,31
Jumlah	**52**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 18 orang (34,62%), diikuti oleh responden berusia 41–50 tahun sebanyak 17 orang (32,69%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berada pada usia produktif dan memiliki pengalaman kerja yang cukup, sehingga diharapkan mampu mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Bupati Batu Bara.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh. Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Diploma (D3)	12	23,08
S1	32	65,38
S2	6	11,54
Jumlah	**52**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 34 orang (65,38%), diikuti oleh responden dengan pendidikan Diploma (D3) sebanyak 12 orang (23,08%), serta Pascasarjana (S2) sebanyak 6 orang (11,54%). Kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah pada Kantor Bupati Batu Bara memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	30.60	39.37	35.21	2.387	52
Residual	-5.053	5.655	.000	2.544	52
Std. Predicted Value	-1.931	1.741	.000	1.000	52
Std. Residual	-1.947	2.178	.000	.980	52

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Predicted Value* memiliki nilai minimum sebesar 30,60 dan maksimum sebesar 39,37, dengan nilai rata-rata 35,21 dan standar deviasi 2,387. Hal ini menunjukkan bahwa nilai prediksi model regresi berada pada rentang yang wajar dan relatif

stabil. Nilai Residual memiliki rata-rata sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami bias. Rentang residual yang berada antara -5,053 hingga 5,655 serta nilai standar deviasi sebesar 2,544 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi masih dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya, nilai *Standardized Predicted Value* dan *Standardized Residual* memiliki nilai rata-rata 0,000 dengan standar deviasi mendekati 1, yang mengindikasikan bahwa data telah terstandarisasi dengan baik dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai residual. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.54441662
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.063
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

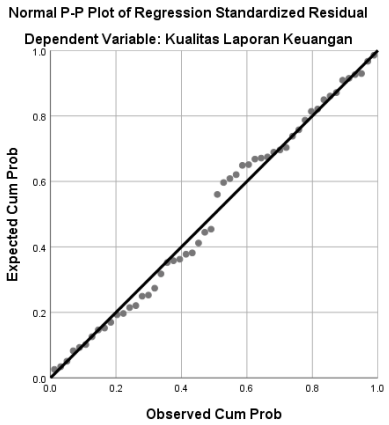
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pengujian normalitas data juga dilakukan melalui analisis grafik Normal P–P Plot. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

tersebut. Hasil pengujian normalitas dengan grafik Normal P–P Plot disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. P-Plot.

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar 2. Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda pada tahap selanjutnya.

Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.984	1.017
	Kualias APD	.984	1.017

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

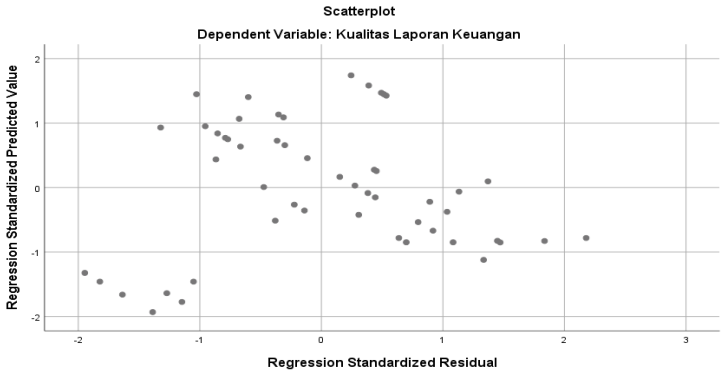
Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas, diketahui bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai Tolerance sebesar 0,984 dan VIF sebesar 1,017. Sementara itu, variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah juga memiliki nilai Tolerance sebesar 0,984 dan VIF sebesar 1,017.

Nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas dan layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 serta pola sebaran titik pada grafik Scatterplot tidak membentuk pola tertentu. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel dan gambar berikut.



Gambar 3. Scatterplot.

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Gambar Scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu regresi tanpa membentuk pola tertentu. Penyebaran titik yang tidak membentuk pola yang jelas menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini. Model regresi dinyatakan telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda pada tahap selanjutnya.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian serta mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	13.130	3.389	
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.376	.085	.463
	Kualias APD	.323	.076	.448

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y=13,130+0,376X1+0,323X2$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X_2 = Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 13,130 menunjukkan nilai positif (+), yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13,130 apabila variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah bernilai nol atau tidak mengalami perubahan. (2) Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) sebesar 0,376 bernilai positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,376, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. (3) Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X_2) sebesar 0,323 juga bernilai positif (+). Artinya, semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Berdasarkan nilai Standardized Coefficients (Beta), variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai beta sebesar 0,463, lebih besar dibandingkan dengan variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebesar 0,448. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, secara individual memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi α = 0,05 (5%). Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t).

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.130	3.389		3.874	.000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.376	.085	.463	4.403	.000
	Kualias APD	.323	.076	.448	4.268	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 52 responden dan jumlah variabel bebas sebanyak 2, maka diperoleh derajat kebebasan (df) sebesar 49 (df = n − k − 1). Dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,009.

Adapun hasil pengujian uji t adalah sebagai berikut: (1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,403, yang lebih besar dari *t tabel* 2,009, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. (2) Kualitas APD (X2) memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,268, yang juga lebih besar dari *t tabel* 2,009, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas APD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai F hitung ≤ F tabel dan nilai signifikansi ≥ 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian simultan (Uji F) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F).

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290.496	2	145.248	21.556	.000[b]
	Residual	330.177	49	6.738		
	Total	620.673	51			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kualias APD, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,556 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas APD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima.

Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.684[a]	.468	.446	2.596

a. Predictors: (Constant), Kualias APD, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber: Output SPSS, data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 10, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,468. Hal ini menunjukkan bahwa 46,8% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas APD, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Bupati Batu Bara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,403 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,009, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan SAP yang baik mampu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Bupati Batu Bara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,268 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,009, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi, pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan, serta tanggung jawab yang baik akan mampu menyusun laporan keuangan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kualitas aparatur yang baik berperan penting dalam memastikan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti & Rahayu (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi (pengetahuan teknis) dan integritas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akurasi dan keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil ANOVA pada Tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 21,556 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan diterima.

Interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah yang berkualitas ditambah dengan penerapan SAP yang konsisten akan meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang akurasi, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, baik kompetensi aparatur maupun kepatuhan terhadap SAP merupakan faktor penting yang saling mendukung untuk mencapai laporan keuangan yang efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widido & Sari (2022) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (path coefficient 0,68). Sari & Wulandari (2018) juga menemukan pengaruh signifikan penerapan SAP terhadap kualitas laporan, dengan koefisien 0,65, menegaskan pentingnya SAP dalam memastikan laporan keuangan yang akurat, jelas, dan andal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,463, t-hitung 4,403, dan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga semakin baik penerapan SAP maka semakin meningkat akurasi, kejelasan, dan keandalan laporan keuangan. Selain itu, kualitas aparatur pemerintah daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai beta 0,448, t-hitung 4,268, dan signifikansi 0,000 (<0,05), yang menunjukkan bahwa aparatur yang kompeten, memahami akuntansi pemerintahan, serta bertanggung jawab mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Secara simultan, penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai F hitung sebesar 21,556 dan signifikansi 0,000 (<0,05), sementara nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,468 mengindikasikan bahwa 46,8% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Saran

Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara konsisten melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan, serta menjadikan peningkatan kualitas aparatur sebagai prioritas melalui pelatihan teknis akuntansi pemerintahan dan pembinaan integritas serta tanggung jawab, sehingga kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan menjadi lebih baik, akurat, jelas, dan andal. Selain itu, terkait variabel kualitas aparatur pemerintah daerah yang memiliki nilai terendah pada indikator kemampuan menggunakan sistem informasi keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian aparatur masih kurang menguasai penggunaan sistem tersebut, sehingga disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kemampuan tersebut melalui pelatihan rutin, workshop praktik, pendampingan teknis, serta penyediaan panduan operasional atau modul e-learning agar proses pelaporan keuangan menjadi lebih akurat, efisien, dan andal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan mengingat penelitian ini hanya mampu menjelaskan 46,8% variasi kualitas laporan keuangan, serta mempertimbangkan penggunaan sampel yang lebih besar atau wilayah yang berbeda guna meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R., & Rahman, S. (2019). The impact of government accounting standards on financial reporting quality in Malaysian local governments.

Ahmad, Z., & Ali, S. (2018). Human resource quality and financial reporting accuracy in local governments: A study in Pakistan.

Ali, Z., & Khan, M. (2019). Internal control systems and accountability in improving financial reporting quality of local governments.

Annisa, N., & Fitra, H. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Padang). *JNKA: Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, 3*(1), 111–124. https://doi.org/10.24036/jnka.v3i1.102

Chan, M., et al. (2021). Government accounting standards and financial transparency in local governments: Evidence from Australia.

Gupta, R., & Sharma, V. (2022). Quality of financial reporting in municipal governments: Role of accounting standards and human capital.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165.

Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606.

Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana, 22*(1), 1–?. https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145

Khan, S. (2017). Determinants of financial reporting quality in local governments: A global perspective.

Kumar, P., & Singh, A. (2023). Adoption of government accounting standards and its effect on financial reporting quality in Indian municipalities.

Lee, H., et al. (2020). Integrity and competence of public officials in enhancing financial accountability: Evidence from South Korea.

Prawati, L. D., & Murwaningsari, E. (2024). Determinant factors of financial reporting quality in local government: The evidence from public sector in Indonesia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFA), 11*(2), 123–134. https://doi.org/10.21512/jafa.v11i2.12469

Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi empiris pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Semarang). Dalam *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4* (hlm. 1389–?). Universitas Islam Sultan Agung.

Ramadhani, N., & Yaya, R. (2024). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 14*(1), xx–xx. https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6064

Sari, F. M. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi empiris pada Kabupaten Batang). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 3*(1), 27–42. https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susilawati, & Tandean, V. A. (n.d.). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *JUSAPAK*.

Warliana, R., Syafina, L., & Hermain, H. (n.d.). Pengaruh PSAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan Kota Medan. *Jurnal Proaksi, 10*(3), 366–381. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060

Widodo, S., Sari, M. K., & Handono, W. D. (2025). Strategi transformasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 23*(1), xx–xx. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v23i1.21932

Zahroh, S., Kusuma, I. C., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, keterandalan, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Karimah Tauhid, 3*(3), 2738. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12583